

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam Program *Jabar Furute Leaders Schorarship* (JFLS). Adapun fungsi pengawasan DPRD adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar dalam pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam program JFLS dilakukan melalui rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, berjalan optimal karena didukung oleh adanya aturan - aturan yang memungkinkan bagi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan wewenang, dan kewajiban yang diemban, adanya komitmen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Pengukuran dalam pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam program JFLS Jaringan dalam menjalankan fungsi pengawasan bagi DPRD juga merupakan hal yang sangat penting, sebab DPRD memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan, baik itu keterbatasan dari segi kuantitas, keterbatasan kualitas maupun keterbatasan dari segi waktu.
3. Perbandingan dalam pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam program JFLS fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui mekanisme dan jalur - jalur resmi

dalam tata pemerintahan, pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing - masing sektor. Sementara itu pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur - jalur yang tidak resmi, seperti misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan secara *ad hoc* oleh masing - masing anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

4. Tindakan dalam pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam program JFLS ini dilakukan oleh pemerintah atau (SKPD) terkait bersama DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai mitra dari pemerintah daerah sekaligus sebagai representasi dari masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

1.2 Saran

Setelah disimpulkan dari hasil penelitian ini, maka perlu kiranya dibuat saran - saran untuk menjadi perhatian dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS). Saran – saran tersebut sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Barat dalam hal melakukan pengawasan harus segera diupayakan jalan keluarnya agar dapat menjalankan pengawasan secara efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan masyarakat dalam perannya melakukan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politik. Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan. DPRD Provinsi Jawa Barat hendaknya juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan *stakeholders* terkait (eksekutif), dalam kerjasama dan komunikasi agar terjalin transparansi yang sehat.